

**PENGARUH PERSEPSI PENYERAPAN ANGGARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
DESA (STUDI KASUS DESA TORONGREJO, JUNREJO, DAN MOJOREJO KECAMATAN  
JUNREJO)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar sarjana akuntansi



Disusun oleh :

**ASTERINA DELFINA EFI**

NIM: 2019110234

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Data keuangan publik memberikan wawasan mengenai kualitas pengelolaan kota. Desa menerbitkan laporan keuangan secara rutin untuk menyampaikan rincian keuangan mereka kepada masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyerapan anggaran desa terhadap perkembangan Desa Torongrejo, Junrejo, dan Mojorejo di Kecamatan Junrejo. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif karena data yang dimasukkan berupa nilai numerik yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke kantor desa terkait, wawancara, dan observasi. Sebagai metode pengumpulan data penelitian ini, kuesioner diberikan kepada responden secara langsung. Teknik pengumpulan data meliputi riset internet, angket, dan dokumentasi. Hasil kajian dan perbincangan sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan desa didorong oleh penyerapan anggaran daerah. Artinya, pembangunan desa yang bertanggung jawab difasilitasi oleh anggaran desa. Pembangunan daerah akan semakin bertanggung jawab jika anggaran daerah terserap semakin baik.

***Kata Kunci:*** Penyerapan, Anggaran, Pembangunan desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan pusat utama pembangunan, dimana otoritas terpilih berinteraksi langsung dengan masyarakat. Anggaran dirancang dengan cermat untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah, dan merupakan cetak biru keuangan yang sangat penting. Konsep pembangunan daerah dan otonomi daerah mempunyai kaitan erat karena keduanya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan nasional. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, otonomi daerah merupakan langkah awal menuju terciptanya perekonomian nasional yang tumbuh lebih cepat. Rasa otonomi yang luas, tulus, dan bertanggung jawab adalah landasannya. Potensi dan keragaman daerah menjadi pertimbangan, dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita demokrasi, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan. Teori ini memperkirakan bahwa realisasi kesejahteraan masyarakat daerah akan terjadi lebih cepat dengan adanya otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan independen, yang diperlukan ketika dilakukan modifikasi, pada kenyataannya adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pembagian tanggung jawab pemerintahan antara tingkat nasional dan daerah.

Pemerintah desa diwajibkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam pelaporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan yang mematuhi peraturan, menurut Suhendri dkk. (2023). Permasalahan yang paling sering muncul ketika menyajikan laporan keuangan dana desa adalah kurangnya pengetahuan tentang fungsi laporan keuangan dalam memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami. Sistem informasi yang ada saat ini menunjukkan bahwa uang dikelola dengan baik.

Sebagian besar keuangan desa digunakan untuk pembangunan desa, sehingga terjadi pergeseran distribusi pemerintahan dari pusat ke pinggiran. Peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah merupakan tujuan utama perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam desentralisasi, ada dua jenis pemerintahan: pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mencakup desa dan kabupaten di samping hierarki fiskal. Kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik, termasuk tuntutan pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah, harus menjadi pusat akuntabilitas yang dicapai melalui desentralisasi fiskal (Suhendri et al., 2023).

Data keuangan publik memberikan wawasan mengenai kualitas pengelolaan kota. Laporan keuangan desa berfungsi sebagai wahana bagi masyarakat untuk memikul tanggung jawab kolektif atas keuangan daerah secara berkala. Relevan, dapat dipahami, cepat, dapat diandalkan, menyeluruh, dan sebanding adalah beberapa atribut yang diperlukan.

Masyarakat kini memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan, menumbuhkan, dan melestarikan adat istiadatnya, serta rasa kemandirian dan kepemilikan harta benda yang lebih kuat, sesuai dengan Undang-Undang Desa atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, undang-undang ini memberikan kebebasan lebih kepada desa untuk menjalankan usahanya sendiri, melaksanakan pembangunan, membimbing masyarakatnya, dan memberdayakan mereka. Desa ditingkatkan dari sekedar unit administratif kabupaten menjadi entitas otonom dengan kewenangan mengawasi dan mengelola jalannya pemerintahan sebagai respons terhadap inisiatif yang berfokus pada lingkungan hidup dengan disahkannya Undang-Undang Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Pahlevi (2015), menjelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan desa secara mudah dan optimal sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 Huruf G, masyarakat desa wajib memperoleh laporan keuangan sesuai dengan standar pemerintah, termasuk seluruh tindakan dan hasil pemerintahan desa (Indrihastuti, dkk., 2023).

Laporan keuangan merupakan alat yang berharga untuk menilai dan membedakan antara sumber daya desa saat ini dan sumber daya sejarah. Mereka dianggap sebagai produk akuntansi. Baik pihak internal maupun eksternal menuntut laporan keuangan, yang berkaitan dengan

perhitungan yang dilakukan dalam pekerjaan untuk menggambarkan keberhasilan suatu lembaga pada setiap periodenya. Akibatnya, setiap industri ingin pelanggan mempertimbangkan laporan keuangan mereka dengan cermat.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, maka penelitian diatas mengangkat judul **“PENGARUH PERSEPSI PENYERAPAN ANGGARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KHASUS DESA TORONGREJO, JUNREJO, DAN MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini, jika dicermati dari sejarah permasalahan sebelumnya, adalah: Apakah pembangunan desa dipengaruhi oleh anggaran dana yang diserap oleh desa Torongrejo, Junrejo, dan Mojorejo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan anggaran desa.
2. Untuk mempelajari kemajuan yang telah dicapai komunitas.
3. Untuk memastikan apakah kemajuan yang ada saat ini digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Studi ini menghasilkan dua hasil yang jelas dan bermanfaat: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, terdapat beberapa manfaat seperti kemajuan teori akuntansi, khususnya mengenai pengaruh serapan anggaran desa terhadap pertumbuhan desa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman kita tentang penganggaran dan pembangunan desa.

- b. Bagi peneliti Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada literatur akuntansi dengan menyoroti faktor-faktor yang menguntungkan dan merugikan serta menawarkan wawasan yang berharga.
- c. Bagi Universitas, dengan mencantumkan referensi, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arina, Irma Seska Ade , Vecky Masinambow , Een N. Walewangko (2021) Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol.22 No.3 (2021)
- Adnan Sauddin dan Ardi Iswanto.(2021). *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya* Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021.
- Arjuna, Pinilas1 , Anderson G. Kumenaung2 , Ita P. Rorong3 (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,. Volume 19 No. 03 Tahun 2019
- Damayanti, Evi Irwan, (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (Makassar : badan penerbit Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Fatmawati, Ade Pipit dan Andi Tenri Awaru Rala. (2020). *LAND JOURNAL* p-ISSN: 2715-9590, e-ISSN: 2716-263X, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (CetakanIV ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2016. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Holik, A. (2019). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Mabat, Desa Mangka, dan Desa Bakam (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Ikatan Akuntansi Indonesia,2009, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan .Jakarta : Salemba Empat.
- Indrihastuti, P., Suhendri, H., & Paila, M. I. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Akuntansi*, 11(2), 197–207. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/59935>
- Junior, Horngren, Thomas, Suwardy. (2012). *Akuntansi Keuangan*. Terjemahan oleh Gina Gania. Jakarta: Erlangga. *Journal of Islamic Finance and Accounting* • Vol. 3 • No. 1 • Hal. 67-82• Januari - Mei 2020.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadia, E. 2021. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-baku Kecamatan Malangke Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).

- Nahar, A., & Widiastuti, A. (2011). Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Industri Menengah Di Kabupaten Jepara. *Semantik*, 1(1).
- Parsa, A. A Gede Putra Indranata Dharma I Wayan. (20). Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang siste pengendalian intern pemerintah
- Pramesti, I. G. A. A., Kepramareni, P., & Juliatmika, I. N. A. (2019). FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Umkm Di Kecamatan Abiansemal. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 1(1), 1-8.
- Prananda, J.P. (2018). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Priyatno, Diuwi. 2016. Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami untuk Tingkat Pemula dan Menengah. Yogyakarta: Gava Media.
- Rimawan, M, & Aryani, fenny (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusi Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima.
- Siallagan, H. (2020). Teori Akuntansi Edisi Pertama.
- Sugiyono, (2015), Statistika Untuk Penelitian. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1/DISERTASI - HENDRIK SUHENDRI - S3 AKUNTANSI - FEB UB.pdf>
- Suhendri, H., Ventiyarningsih, A.D.I., Supriyono. (2023). *Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis*. Cetakan ke I : Januari 2023. Malang, Jatim : Literasi Nusantara.
- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa